

Diplomasi pada Era Informasi

Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Membangun Citra



Sukawarsini Djelantik



Diplomasi pada Era Informasi:

Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri,
dan Membangun Citra



327-2
DJE
d
145238 / M/SB - FISIP
12-8-2022

Disusun oleh:
Sukawarsini Djelantik, Ph.D.



2021

No. Klass 327-2 DJE.d
No. Induk 145238 Tgl 12-8-2022
Hadiah/Ret

Diplomasi pada Era Informasi:

Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri,
dan Membangun Citra



327-2
DJE
d
145238 / 14 / SB - FISIP
12-8-2022

Disusun oleh:
Sukawarsini Djelantik, Ph.D.



2021

No. Kelas	327-2	DJE d
No. Induk	145238	Tgl 12-8-2022
Mantle /		

Judul:

Diplomasi pada Era Informasi: Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri,
dan Membangun Citra

Penyusun:

Sukawarsini Djelantik, Ph.D.

Penyelaras dan tata letak isi:

Maria Christina

Navita Kristi Astuti

Desain cover:

Maria Christina

ISBN: 978-623-7879-34-3

Penerbit:

Unpar Press

Jl Ciumbuleuit No 100, Bandung 40141

unparpress@unpar.ac.id

Cetakan I: 2021

Kata Pengantar

Buku Diplomasi Pada Era Informasi: Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri dan Membangun Citra”, membahas peran internet yang telah mengubah hampir semua aspek dalam kehidupan manusia modern termasuk diplomasi. Buku ini terbagi atas tiga bagian besar: diplomasi virtual dan tinjauan umum diplomasi (bilateral dan multilateral) yang dilengkapi serta studi kasus. Bagian kedua terkait diplomasi ekonomi, dan diplomasi publik yang berhubungan dengan upaya membangun citra positif terhadap publik asing.

Internet merupakan inovasi yang paling transformatif dan telah mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan politik global. Internet memungkinkan terwujudnya masyarakat berjejaring yang terhubung melalui perangkat digital. Internet memungkinkan mengalirnya informasi secara bebas sehingga setiap orang terlibat dalam penyusunan politik luar negeri maupun berdiplomasi. Bergesernya peran diplomat dan perwakilan-perwakilan di luar negeri menyebabkan timbulnya “diplomasi tanpa diplomat”, “diplomasi digital” atau “Kedutaan Besar virtual”. Internet menggantikan pertemuan-pertemuan tatap muka menjadi dalam jaringan (*daring*), sehingga negosiasi, penyusunan kebijakan, manajemen krisis, perlindungan warga negara, dilakukan secara virtual. Bagian pertama membahas diplomasi digital serta berbagai konsekuensi dari berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tinjauan selanjutnya terkait peran negara dalam memanfaatkan TIK dalam berdiplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Topik-topik selanjutnya tidak terlepas dari peran internet dan masyarakat jaringan, terutama dalam isu-isu

terkait diplomasi publik, diplomasi budaya, yang bertujuan membangun citra positif di negara lain.

Topik kedua membahas diplomasi multilateral, yang menekankan pada kerja sama antarnegara untuk merancang dan menetapkan norma-norma dan membangun tatanan global. Kerja sama multilateral dilakukan untuk mengejar kepentingan negara, selain menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Pada bagian ini dibahas komitmen dan keterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan kemanusiaan. Pembahasan juga mencakup berbagai tantangan diplomasi multilateral dalam negosiasi, yakni situasi keamanan global dan konflik antarnegara. Kepentingan-kepentingan negara seringkali menyebabkan kompleksitas masalah dan rentang waktu yang relatif lama dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan. Kendala lainnya terkait unilateralisme dan proteksionisme yang memerlukan kerja sama global.

Tulisan ketiga membahas implementasi kerja sama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kawasan yang strategis ini memiliki dinamika yang tinggi dan jurang perbedaan dalam tingkat sosio-ekonomi, juga menjadi rumah bagi kekuatan-kekuatan besar. Beberapa negara di kawasan merupakan pemain utama yang menjadi penentu berbagai kerja sama. Kawasan ini juga masih diwarnai masalah-masalah yang belum terselesaikan termasuk konflik perbatasan di darat dan laut. Artikel membahas berbagai upaya dan kerja sama untuk mengatasi berbagai masalah seperti dialog dan negosiasi.

Tulisan selanjutnya membahas diplomasi Jerman dalam penyelesaian krisis pengungsi Suriah di Eropa, oleh Loran Palseo Tambunan. Artikel ini merepresentasikan model efektivitas diplomasi Jerman dalam menanggulangi krisis pengungsi selama

terkait diplomasi publik, diplomasi budaya, yang bertujuan membangun citra positif di negara lain.

Topik kedua membahas diplomasi multilateral, yang menekankan pada kerja sama antarnegara untuk merancang dan menetapkan norma-norma dan membangun tatanan global. Kerja sama multilateral dilakukan untuk mengejar kepentingan negara, selain menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Pada bagian ini dibahas komitmen dan keterterlibatan Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan kemanusiaan. Pembahasan juga mencakup berbagai tantangan diplomasi multilateral dalam negosiasi, yakni situasi keamanan global dan konflik antarnegara. Kepentingan-kepentingan negara seringkali menyebabkan kompleksitas masalah dan rentang waktu yang relatif lama dalam penyelesaian masalah dan mengambil keputusan. Kendala lainnya terkait unilateralisme dan proteksionisme yang memerlukan kerja sama global.

Tulisan ketiga membahas implementasi kerja sama di kawasan Asia Pasifik dan Afrika. Kawasan yang strategis ini memiliki dinamika yang tinggi dan jurang perbedaan dalam tingkat sosio-ekonomi, juga menjadi rumah bagi kekuatan-kekuatan besar. Beberapa negara di kawasan merupakan pemain utama yang menjadi penentu berbagai kerja sama. Kawasan ini juga masih diwarnai masalah-masalah yang belum terselesaikan termasuk konflik perbatasan di darat dan laut. Artikel membahas berbagai upaya dan kerja sama untuk mengatasi berbagai masalah seperti dialog dan negosiasi.

Tulisan selanjutnya membahas diplomasi Jerman dalam penyelesaian krisis pengungsi Suriah di Eropa, oleh Loran Palseo Tambunan. Artikel ini merepresentasikan model efektivitas diplomasi Jerman dalam menanggulangi krisis pengungsi selama

tidak menunjukkan niat tulus untuk meminta maaf, melainkan berisi kepentingan politik untuk tujuan memperbaiki citra negara di mata internasional. Penulis mengklaim bahwa upaya-upaya diplomasi Jepang bersifat “setengah hati”, yaitu sekadar mengejar kepentingan negara karena lebih banyak indikator yang tidak dipenuhi. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa dalam diplomasi, kepentingan politik dalam negeri lebih menonjol dibandingkan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan.

Bagian kedua memfokuskan pada diplomasi ekonomi, yang menjadi fokus negara mengejar kepentingan pasca Perang Dingin. Artikel pertama berjudul “Diplomasi Ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia”, dengan mengambil studi kasus negosiasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung”, disusun Atika Silvia. Pembahasan terkait diplomasi Indonesia untuk mewujudkan proyek kereta cepat Bandung-Jakarta, yang didapatkan Tiongkok setelah melalui berbagai tahapan diplomasi ekonomi. Diplomasi Tiongkok didukung klaim keunggulan dalam sektor teknologi, sehingga memenangkan proyek pembangunan. Keunggulan diplomasi Tiongkok lainnya adalah komitmen tidak melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia dan menerapkan skema *business to business* dalam pendanaannya. Keunggulan-keunggulan lainnya adalah Tiongkok melakukan berbagai upaya promosi dan menerapkan program transfer teknologi, serta pelatihan sumber daya manusia. Keberhasilan diplomasi ekonomi Tiongkok didukung fleksibilitas yang seolah-olah mengedepankan kepentingan Indonesia.

Artikel selanjutnya membahas diplomasi ekonomi Indonesia melalui bantuan teknik di Timor Leste, oleh *Siti Sarah Purwanti Assegaf*. Diplomasi ekonomi Indonesia melalui pemberian bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan luar negeri. Di sisi lain, Timor Leste mengalami kesulitan

ekonomi dan kerusakan infrastruktur pascareferendum pada tahun 1999, sehingga membutuhkan bantuan luar negeri. Penulis membahas beberapa motif negara dalam memberikan bantuan luar negeri, yaitu politis, strategis, komersial, serta keinginan membantu mengatasi masalah di negara penerima. Disimpulkan bahwa motif politik merupakan alasan utama Indonesia dalam memberikan bantuan ekonomi, apalagi posisi Timor Leste yang termasuk ke dalam kriteria skala A, atau negara prioritas. Diplomasi Indonesia juga didukung motif komersial, untuk meningkatkan aktivitas industri, perbankan, pembangunan infrastruktur, selain membantu mengatasi masalah kesehatan dan lingkungan hidup. Kepentingan sampingan Indonesia lainnya termasuk tujuan promosi kebudayaan, pariwisata serta pendidikan.

Artikel ketiga terkait diplomasi ekonomi Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam bidang tata kelola lingkungan, disusun oleh *Fildza Malifa Setiabudi*. Kerja sama antara Jepang dan Indonesia dilakukan untuk mencapai tujuan pemberian *Official Development Assistance* (ODA) untuk membantu mengelola kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Bantuan teknik diberikan dalam bentuk sistem tata kelola oleh JICA melalui proyek-proyek pengelolaan lingkungan. Konsep yang digunakan penulis adalah diplomasi ekonomi dan kebijakan luar negeri untuk menjelaskan bantuan sebagai alat mencapai kepentingan nasional. JICA memberikan bantuan teknis dan penyediaan anggaran bagi tercapainya tujuan diplomasi Jepang berdasarkan Piagam ODA. Program-program JICA di Indonesia dalam bidang lingkungan sesuai dengan prinsip ODA, yaitu meningkatkan kemampuan membantu diri sendiri bagi negara penerima, meningkatkan keamanan manusia, menegakkan keadilan, dan belajar dari pengalaman Jepang. Prinsip-prinsip tersebut berhasil diterapkan secara efektif melalui program-program JICA.

Bab ketiga terkait diplomasi publik dan citra negara, dibuka dengan artikel oleh Inigo Abigail, berjudul "Diplomasi Panda Tiongkok Terhadap Amerika Serikat (AS)". Artikel menyoroti kecenderungan baru dalam diplomasi publik dan penerapan *soft power* untuk tujuan memengaruhi hati dan pikiran masyarakat di negara lain. Tiongkok menerapkan diplomasi publik terhadap AS dengan memanfaatkan hewan panda (*Ailuropoda melanoleuca*). Diplomasi panda di AS diterapkan untuk mewujudkan kepentingan Tiongkok dalam bidang politik, ekonomi dan konservasi. Panda menjadi sarana mencapai tujuan normalisasi hubungan Sino-Amerika, peningkatan gestur diplomasi, serta ungkapan rasa terima kasih dan persahabatan. Diplomasi panda juga memberikan pemasukan bagi Tiongkok melalui sistem sewa untuk setiap ekor panda yang berada di AS. Keuntungan lainnya adalah pengadaan prasarana tambahan untuk mendukung keberlangsungan hidup panda di AS, yang hanya dapat disediakan oleh Tiongkok. Kepentingan konservasi termasuk mencegah kepunahan panda di Tiongkok, dengan cara melindungi dan mengembangbiakkan populasi, terutama karena adanya jaminan bahwa setiap panda yang dipinjamkan dipelihara dan dirawat dengan baik. Diplomasi panda Tiongkok terhadap AS berhasil, selain mencapai kepentingan Tiongkok dalam aspek politik, ekonomi dan konservasi.

Artikel selanjutnya berjudul: "Diplomasi Pembangunan Australia terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan", disusun oleh Gracia Yobel Galilea. Program bantuan dari negara maju terhadap negara berkembang tidak semata-mata ungkapan niat baik, juga cara mempromosikan citra negara dan melengkapi agenda politik luar negeri. Nauru sebagai negara republik terkecil di dunia, memerlukan bantuan pendidikan untuk menciptakan perekonomian mandiri dan berkelanjutan. Pembahasan menerapkan teori diplomasi publik melalui pembangunan, dan diplomasi multijalur untuk membahas para pelaku diplomasi

publik. Selama tahun 2013-2018, *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) Australia menerapkan berbagai program pendidikan untuk para guru di Nauru, memberikan beasiswa, mendirikan Desa Belajar, dan menempatkan penasehat teknis untuk membantu Kementerian Pendidikan. Melalui bantuan pendidikan, Australia memberikan dampak signifikan terhadap publik di Nauru selain meningkatkan citra negara.

Artikel selanjutnya terkait diplomasi budaya Indonesia terhadap Rusia, disusun oleh Vidya Adhikrisna. Penelitian membahas keberagaman seni budaya Indonesia yang merupakan aset berharga dan instrumen diplomasi. Artikel ini mengkaji upaya-upaya diplomasi kebudayaan di Rusia selama tahun 2016-2018. Diplomasi budaya bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dan Rusia dalam meningkatkan kerja sama dan persahabatan. Untuk membangun citra positif di Rusia, Indonesia menyelenggarakan Festival, Hari Budaya, konser musik, Pekan Kuliner, serta kursus tari dan seni bela diri Pencak Silat. Keberhasilan diplomasi budaya didukung aktor-aktor pemerintah, kalangan profesional, pelaku bisnis, warga negara, program pelatihan serta media massa elektronik dan media sosial. Diplomasi budaya Indonesia di Rusia berhasil dilihat dari melalui respons positif melalui media massa elektronik maupun media sosial.

Artikel selanjutnya membahas diplomasi budaya Australia terhadap Indonesia melalui Industri kreatif mode, disusun oleh Silvia Larasati. Pentingnya diplomasi budaya Indonesia di Australia berdasarkan fakta kedekatan geografis kedua negara yang tidak disertai kedekatan sosial-budaya, selain perbedaan latar belakang sejarah serta sistem politik. Walaupun memiliki banyak perbedaan, kedua negara telah berusaha saling berkomunikasi melalui kerja sama dalam bidang keamanan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Namun, kerja sama lebih memfokuskan pada pemerintah dan

kurang melibatkan individu dan swasta. Fakta ini melatarbelakangi DFAT Australia bekerja sama dalam bidang industri kreatif dan mode. Dengan menerapkan konsep diplomasi multijalur, artikel membahas peran aktor-aktor pendukung, dan disimpulkan bahwa efektivitas program sangat dibantu oleh publikasi melalui media massa dan media sosial.

Artikel selanjutnya terkait diplomasi Publik Tiongkok terhadap Amerika Serikat melalui *Confucius Institute (CI)*, disusun oleh *Jeanet Priscila*. Penelitian dilatarbelakangi persepsi negatif Amerika Serikat (AS) terhadap kebangkitan Tiongkok dalam perekonomian dan perpolitikan global. Di sisi lain, Tiongkok berusaha menjaga hubungan baik dengan AS melalui *Confucius Institute (CI)*. *CI* merupakan institusi pendidikan dan kebudayaan yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Tiongkok, dan bertujuan membangun citra positif terutama untuk generasi muda AS. Tulisan ini membahas berbagai upaya *CI* tahun 2014-2018 dengan mengimplementasikan konsep diplomasi publik Nicholas Cull dan diplomasi multijalur Louis Diamond dan John McDonald. *CI* bekerja sama dengan universitas lokal AS, mengajarkan bahasa dan kebudayaan Tiongkok, mengadakan program-program kesenian, mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa, dan menyelenggarakan forum-forum diskusi. Penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya *CI* di AS berhasil menyampaikan ide-ide dan kebijakan negara.

Artikel selanjutnya berjudul “Diplomasi Budaya melalui Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)” oleh Masya Afira. Artikel membahas diplomasi publik Indonesia melalui BSBI, yaitu program yang melibatkan pemuda-pemudi asing dari berbagai negara untuk mempelajari seni tradisional dan Bahasa Indonesia. Tulisan membahas berbagai program BSBI di antaranya pembelajaran seni tradisional, Bahasa Indonesia untuk Penutur

Asing (BIPA), dan mengisi *Indonesia Channel* 2018. Program BSBI didukung oleh pemerintah yaitu Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Dinas Pariwisata), dan non-pemerintah seperti sanggar-sanggar mitra Kemlu, enam universitas di Indonesia, dan media-massa. Penelitian menyimpulkan bahwa BSBI berhasil menjalankan diplomasi budaya dengan melibatkan aktor pemerintah dan swasta, namun peran media massa masih kurang efektif.

Artikel berjudul: "Diplomasi Publik Indonesia Melalui *Asian Games* 2018" disusun Siti Nurhaliza, membahas keberhasilan pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum *Asian Games* untuk memperbaiki citra negara. Penelitian dilatarbelakangi citra negatif dan pesimisme terhadap Indonesia terkait kemampuan menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat dunia. Pesimisme disebabkan citra negatif mengenai kemampuan organisasi, prestasi olah raga dan keamanan negara. Sebagai tuan rumah *Asian Games* 2018, Indonesia membuktikan keberhasilan menyelenggarakan *event* dengan baik sehingga pesimisme berubah menjadi optimisme dan kebanggaan. Tulisan ini menerapkan teori diplomasi publik dan diplomasi multijalur untuk menganalisis keterlibatan pemerintah dan swasta dalam mendukung program. Tiga aspek yang menjadi fokus yaitu organisasi, prestasi olah raga, dan keamanan. Keberhasilan penyelenggaraan berhasil meningkatkan citra dan memperoleh respons positif masyarakat internasional.

Artikel terakhir terkait diplomasi publik oleh *Korean Cultural Center* (KCC) di Indonesia, disusun oleh Tiara Dewi Aghnia. Topik dilatarbelakangi masalah hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan (KS) yang telah berlangsung selama 46 tahun. Bagi KS, Indonesia merupakan pemasok sumber daya alam, sehingga perlu menjaga hubungan baik dan membangun citra positif. *Korean*

Cultural Center (KCC) memanfaatkan *Hallyu* untuk menjalankan diplomasi publik di Indonesia. Aktivitas KCC termasuk menyelenggarakan acara *Seollal*, kegiatan kelas bahasa dan budaya, pertunjukan seni musik dan tarian tradisional, lomba pidato, *Korea Indonesia Film Festival (KIFF)*, berkolaborasi dalam acara *Jakarta Fashion Week (JFW)*, dan menyebarkan informasi melalui situs resmi dan media sosial. Kegiatan-kegiatan KCC melibatkan peran swasta seperti kelompok profesional, bisnis, individu, institusi pendidikan, media massa dan media sosial. Keterlibatan media masih minim dari segi kuantitas publikasi dan jangkauan. Upaya-upaya KCC dalam diplomasi publik KS efektif dalam meningkatkan citra positif karena dukungan aktor-aktor swasta.

Berbagai tulisan tersebut mendukung pemahaman bahwa globalisasi, teknologi informasi dan internet secara signifikan mengubah diplomasi. Perubahan pada pelaku, media, dan masalah yang dihadapi menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas diplomasi. Keseluruhan artikel menunjukkan peran pemerintah yang semakin menurun, sementara aktor-aktor swasta menjadi semakin penting dan berpengaruh. Maka sangat penting untuk memahami dan menyikapi berbagai perubahan tersebut untuk mewujudkan program-program diplomasi yang berdampak signifikan bagi tujuan membangun citra dan kepentingan negara.

Bandung, 4 November 2021.

Daftar Isi



Kata Pengantar.....iii

Daftar Isixiii

Daftar Gambarxvi

Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri

1. Diplomasi Digital dalam Hubungan Internasional
Sukarwarsini Djelantik 1
2. Diplomasi Multilateral dan Kepentingan Nasional
Sukawarsini Djelantik..... 29
3. Diplomasi dan Kerja Sama Kawasan: Asia Pasifik dan Afrika
Sukawarsini Djelantik..... 59
4. Diplomasi Jerman dalam Penyelesaian Krisis
Pengungsi Suriah di Eropa
Loran Palseo Tambunan 85
5. Diplomasi dan Citra Negara: Studi Kasus Permohonan Maaf
Jepang terhadap Korea Selatan terkait Isu *Comfort Women*
(2012-2015)
Giasinta Livia..... 123

Diplomasi Ekonomi

6. Diplomasi Ekonomi Tiongkok terhadap Indonesia: Studi Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Atika Silvia..... 157
7. Diplomasi Ekonomi Indonesia Melalui Bantuan Teknik di Timor Leste
Siti Sarah Purwanti Assegaf 191
8. Diplomasi Ekonomi Jepang Melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam Tata Kelola Lingkungan
Fildza Malifa Setiabudi..... 217

Diplomasi Publik dan Citra Negara

9. Diplomasi Panda Tiongkok terhadap Amerika Serikat
Inigo Abigail 255
10. Diplomasi Pembangunan Australia terhadap Nauru dalam Bidang Pendidikan
Gracia Yobel Galilea 291
11. Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Rusia
Vidya Adhikrisna 327
12. Diplomasi Kebudayaan Australia terhadap Indonesia Melalui Industri Kreatif Mode
Silvia Larasati 355
13. Diplomasi Publik Tiongkok terhadap Amerika Serikat Melalui Confusius Institute (CI)
Jeanet Priscila..... 381

14. Diplomasi Budaya Melalui Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI)	
<i>Masya Afira</i>	417
15. Diplomasi Publik Indonesia Melalui Asian Games 2018	
<i>Siti Nurhaliza</i>	443
16. Diplomasi Publik oleh Korean Cultural Center (KCC) di Indonesia	
<i>Tiara Dewi Aghnia</i>	463

Daftar Gambar

Gambar 1.1.	Pertemuan Virtual G-20, Juli 2020	7
Gambar 1.2.	Pemimpin Negara dengan Pengikut Twitter Terbanyak	10
Gambar 1.3.	Contoh <i>Twiplomacy</i> Presiden AS Donald Trump	18
Gambar 1.4.	Infografis Julian Assange, pendiri Wikileaks	23
Gambar 2.1.	Indonesia Terpilih sebagai Anggota DK-PBB 2019	41
Gambar 3.1.	Infografis Kawasan Asia-Pasifik dan Afrika	60
Gambar 3.2.	Neraca Perdagangan Indonesia dengan Kawasan Aspasaf (2017)	65
Gambar 4.1.	Demonstrasi Menuntut Pembukaan Perbatasan Bagi Imigran	89
Gambar 5.1.	Jugun Ianfu Korea pada masa Perang Dunia II	126
Gambar 5.2.	Patung <i>Jugun Ianfu</i> di Depan Konsulat Jepang di Busan, Korea	131
Gambar 6.1.	Komik Kritikan Terhadap Proyek Kereta Cepat	159
Gambar 6.2.	Kereta Cepat Jakarta-Bandung	162
Gambar 6.3.	Pameran Kereta Cepat Tiongkok	168
Gambar 6.4.	Model Kereta Cepat yang Ditawarkan Tiongkok	177
Gambar 7.1.	Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PM-TL	202

Gambar 8.1.	Komik Banjir Bandang Kolaborasi DSDA-KPU dan JICA	230
Gambar 8.2.	Teknologi Sabo, Kerja Sama DSDA-KPU dengan JICA	235
Gambar 9.1.	Negara-negara Pemilik Panda Tiongkok	264
Gambar 10.1.	Situasi Belajar Nauru <i>Teacher Education Project</i> di Pusat Pembelajaran UNE	306
Gambar 10.2	Murid-murid Nauru yang Lulus dalam Program Sertifikasi APTC	313
Gambar 10.3.	Situasi di Hari Pengesahan Bangunan USP Tahun 2018	316
Gambar 11.1.	Tanggapan Pengunjung Festival Indonesia	338
Gambar 11.2.	Kolaborasi Penari Indonesia dan Rusia dalam Tari Saman Gayo	343
Gambar 11.3.	Pelatihan Tari pada Kursus Tari Tradisional	347
Gambar 12.1	Busana Karya Toton Januar di Ajang WoolmarkPrize 2016	360
Gambar 12.2.	Publikasi Poster Lokakarya <i>Naturally Inspiring Wool</i> oleh Majalah Cleo Indonesia via Twitter	362
Gambar 12.3.	Respons Positif Lokakarya <i>Naturally Inspiring Wool</i>	363
Gambar 12.4.	Peserta Kursus Singkat <i>Australia Awards Fashion and Textile</i>	367
Gambar 12.5.	Pagelaran Busana <i>East Meets West</i> di KBRI Canberra	370
Gambar 12.6.	Publikasi Pagelaran <i>Indonesia Beautiful</i> di Youtube	372

Gambar 12.7.	Respons Positif Masyarakat Australia Untuk Karya Busana di <i>Indonesia Beautiful 2</i>	375
Gambar 13.1.	Kelas Bahasa Mandarin di TSUCI	391
Gambar 13.2.	Pamflet Perayaan Pertengahan Musim Gugur 2015	395
Gambar 13.3.	Tari Naga oleh Staf Pengajar TSUCI	397
Gambar 13.4.	Para Peserta Kamp Musim Panas 2017	399
Gambar 13.5.	Akun Youtube Memasak pangsit oleh mahasiswa Texas Southern University	402
Gambar 13.6.	Mengajarkan Bahasa Mandarin pada Program <i>Summer Camp 2015</i>	404
Gambar 13.7.	Narasumber dalam Konferensi Globalisasi di Tiongkok tahun 2016	407
Gambar 14.1.	Peserta BSBI dalam Pelatihan Tari di Makassar	428
Gambar 14.2.	Pembukaan Pusat Kebudayaan Benin-Indonesia di Benin	430
Gambar 15.1.	Presiden RI Joko Widodo Pada Pembukaan Asian Games 2018	451
Gambar 16.1.	Poster Program Seollal oleh <i>Korean Cultural center (KCC) 2018</i>	470
Gambar 16.2.	#BTS dan #EXO Terbanyak di Indonesia pada Tahun 2018	483

1.

Diplomasi Digital dalam Hubungan Internasional

Sukawarsini Djelantik

Abstrak

Internet telah menjadi salah satu inovasi yang paling transformatif dan telah mengubah tatanan sosial, ekonomi dan politik global. Dalam berinteraksi, terjadi perubahan drastis yang ditandai dengan masyarakat berjejaring (*networked society*). Hampir semua orang di dunia terhubung melalui perangkat digital dengan informasi yang mengalir bebas. Informasi didapat, disimpan, diproses, dikelola, dan dibagi dengan cara yang hampir sama sekali berbeda dari cara-cara di masa lalu. Dalam politik luar negeri, internet telah membawa banyak perubahan dalam cara berdiplomasi sehingga dikenal istilah “diplomasi digital.” Aktivitas digital memiliki peran dalam negosiasi, proses pembuatan kebijakan, manajemen krisis, perlindungan warga negara, yang terkait dengan diplomasi. Tulisan ini membahas diplomasi digital serta berbagai konsekuensi dari berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta meninjau bagaimana negara-negara lain memanfaatkan dalam berdiplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional.

Pengantar

Perangkat digital, telepon genggam, dan media sosial, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi penduduk dunia. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah pengguna internet seluruh dunia naik hampir tiga kali lipat. Dengan populasi dunia sejumlah 7,7 miliar, pengguna telepon genggam berjumlah 5,1 miliar. Sejumlah 4,54 miliar pengguna internet, serta 3,80 miliar orang pengguna aktif media sosial.¹ Dengan meningkatnya teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menunjukkan bahwa segala aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Dalam penerapan politik luar negeri dan diplomasi, penggunaan TIK sudah menjadi fenomena umum sehingga dikenal istilah “diplomasi digital”. Diplomasi digital merujuk pada penggunaan teknologi yang lebih luas, terutama internet dan inovasi berbasis TIK lainnya dalam berdiplomasi. Diplomasi digital semakin luas memanfaatkan media sosial oleh negara untuk mencapai tujuan politik luar negeri, termasuk upaya-upaya proaktif dalam mengelola citra dan reputasi. Diplomasi digital dikenal juga dengan istilah-istilah lain seperti *e-diplomacy*, *diplomasi siber*, *diplomasi 2.0*, atau yang memanfaatkan *Twitter* dikenal istilah *Twiplomacy*. Istilah diplomasi siber lebih merujuk pada strategi untuk menangani berbagai masalah, seperti keamanan, yang muncul dalam ruang siber.

Sebagai implementasi dari politik luar negeri, diplomasi merupakan bagian yang terpenting dari hubungan internasional. Diplomasi sebagai cara negara mengartikulasikan kebijakan luar negeri dan mengkoordinasikan upaya-upaya dalam memengaruhi

¹ Wee Sosial, Digital 2020; 3.8 Billion People Use Social Media, <https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-use-social-media>, diakses tanggal 29 Juli 2020.

keputusan dan tingkah laku pemerintah dan publik di negara lain. Diplomasi dilakukan melalui dialog, negosiasi, lobi, dan cara-cara lainnya seperti kekerasan dan perang. Tujuan diplomasi secara umum adalah untuk memperjuangkan kepentingan nasional, baik yang spesifik maupun yang lebih besar. Tujuan yang tidak kalah penting adalah mencegah konflik dan meningkatkan kerja sama. Diplomasi menjadi instrumen penting untuk mengejar tujuan melalui strategi dan taktik untuk mempertahankan perdamaian, mengembangkan kerja sama, atau mempertahankan netralitas. Diplomasi dapat dilakukan secara langsung/tatap muka atau melalui media; baik yang konvensional seperti surat kabar, televisi, radio, atau media sosial berbasis internet seperti *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, *Instagram*, dan lain-lain.

Diplomasi digital dipergunakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar yang lokasinya tersebar di seluruh dunia. Melalui dua fungsi yang berbeda, negara dapat merancang kebijakan luar negeri dan menyampaikan pesan-pesan untuk membangun citra positif negara (*nation branding*). Pada level Kedutaan Besar, fokus perhatian dan sasaran kebijakan serta aktivitas lebih ditujukan pada penduduk lokal yang memiliki karakteristik unik yang disesuaikan dengan sejarah, budaya, nilai-nilai dan tradisi.² Tujuan lainnya adalah memfasilitasi kebijakan luar negeri agar diterima dengan baik oleh masyarakat negara penerima selain untuk tujuan promosi perdagangan, peningkatan investasi, atau pariwisata.

Diplomasi digital juga pemakaian alat-alat komunikasi digital (media sosial) oleh diplomat untuk berkomunikasi dengan satu sama lainnya dan dengan masyarakat. Secara mendasar, diplomasi digital telah membawa perubahan dari diplomasi

² Olubukola S. Adesina, *Foreign Policy in an era of Digital Diplomacy*, *Journal Congen Social Science*, Vol. 3 2017, Vol.1.

tradisional. Perubahan yang dimaksud dari aspek struktur dan proses; struktur menjadi tidak terlalu kaku karena setiap orang dapat langsung berhubungan tanpa dibatasi sekat-sekat birokrasi. Dari aspek proses, negosiasi dan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Revolusi TIK menghasilkan pengawasan arus informasi bergerak ke segala arah, sehingga diseminasi informasi menjadi cepat dan jangkauannya luas. Diplomasi digital memungkinkan orang untuk memberikan penilaian pribadi, mengekspresikan kegundahan, perhatian, perasaan, bahkan mempengaruhi pembuat kebijakan. Konsekuensinya, cara pemerintah berinteraksi juga menjadi lebih cepat dan menjangkau lebih banyak kalangan.

Diplomasi digital umumnya mengacu pada pelaksanaan diplomasi yang memakai teknologi digital dan jaringan termasuk internet, telepon seluler, dan berbagai aplikasi media sosial. Tujuan diplomasi digital dapat diuraikan menjadi delapan, yaitu:

1. *Memperoleh Informasi.* Informasi dimanfaatkan oleh Kementerian untuk dibagikan, dianalisis, dan diimplementasikan dalam kebijakan secara optimal untuk mengejar kepentingan nasional.
2. *Mendukung Aktivitas diplomasi publik;* termasuk menjaga kontak dengan masyarakat di negara penerima. Karena masyarakat sasaran telah bermigrasi ke media media *online*, maka diplomasi publik dilengkapi alat komunikasi baru untuk mendengarkan dan mencapai sasaran komunikasi melalui pesan-pesan yang disesuaikan dengan tujuan untuk memengaruhi masyarakat di negara penerima.
3. *Mengelola Informasi.* Dengan membantu mengumpulkan informasi, memilah-milah, dan memanfaatkannya untuk

memberikan informasi yang lebih baik kepada perancang kebijakan. Selain itu, untuk membantu mengantisipasi dan merespons pergerakan sosial dan politik di negara asal maupun penerima.

4. *Komunikasi konsular dan merespons krisis*. Dengan cara membangun saluran komunikasi yang bersifat langsung dan personal dengan warga negara yang sedang bepergian ke luar negeri. Komunikasi digital dilengkapi dengan jenis-jenis komunikasi yang dapat dikelola pada waktu dan situasi krisis.
5. *Respons bencana*. Diplomasi digital dapat dilengkapi dengan aplikasi untuk merespons dalam situasi bencana.
6. *Kebebasan internet*. Mengkreasikan teknologi untuk membuat internet bersifat gratis dan terbuka. Tujuannya terkait dengan mempromosikan kebebasan untuk berbicara dan demokrasi selain mengurangi rezim otoriter.
7. *Sumber daya eksternal*: Mengkreasikan mekanisme digital untuk membangun dan melengkapi keahlian eksternal untuk mencapai tujuan nasional.
8. *Merancang kebijakan*. Diplomasi digital memungkinkan memberikan informasi dan cara pandang yang efektif. Selain itu untuk berkoordinasi dan merancang kebijakan internasional di antara pemerintah, sebagai respons atas internasionalisasi birokrasi.³

³ Hanson, F. 2012, October 25, *Baked in and wired: eDiplomacy@State*, *Foreign Policy Paper Series No. 30*, Washington, DC: *Brookings Institution*, hal. 1–41, dalam Olubukola S. Adesina, *Foreign policy in an era of digital diplomacy*, *Journal Congen Social Science*, Vol. 3 2017, Vol.1.

media termasuk *Korea.net*, *Majalah Gadis*, *The Seoul Story* dan media sosial KCC.

KCC berhasil menjadi inisiator, namun koordinasi dengan media kurang maksimal. Di beberapa kegiatan besar seperti *JFW*, pertunjukan seni, *Hansik Contest* dan *KIFF*, KCC berhasil melibatkan media Indonesia dalam menyebarkan dan meliput informasi terkait acara. Namun di kegiatan-kegiatan yang cakupannya tidak terlalu luas seperti kelas bahasa, budaya, dan *K-Pop Academy*, KCC kurang melibatkan media Indonesia. Walaupun media sosial KCC sudah berperan dalam menyebarkan informasi, namun keterlibatan media Indonesia dalam acara-acara yang cakupannya kecil akan membuat masyarakat Indonesia lebih terinformasi. Faktor inilah yang belum dimanfaatkan oleh KCC.

Dengan terciptanya citra positif Korea Selatan di mata publik Indonesia, maka diharapkan hubungan baik terjaga dan kerja sama meningkat. KS berhasil memengaruhi publik Indonesia melalui meningkatnya popularitas *K-Pop* seperti ditunjukkan melalui banyaknya pendukung *BTS* dan *EXO* di media sosial *twitter*. Dukungan publik Indonesia terhadap KS menunjukkan bahwa KS berhasil meningkatkan citra positif di mata pemerintah maupun masyarakat.

Daftar Referensi

“Hubungan Bilateral”, Kedutaan Republik Indonesiadi Seoul
Republik Korea,
<https://www.kemlu.go.id/seoul/id/Pages/Hubungan-Bilateral.aspx#>.

"Indonesia and Korea Partnership", *The Jakarta Post*,
<https://www.thejakartapost.com/academia/2017/11/09/editorial-indonesia-korea-partnership.html>.

"Indonesia and Korea Partnership", *The Jakarta Post*.

Muzaffar S. Abduazimov, "Public Diplomacy: Reappraising the South Korean Case through an Evolutionary Approach," *Korea Journal* 57, no. 3 (2019): 83–111,
<https://doi.org/10.25024/kj.2017.57.3.83>.

"Korea Information-Government," Korean Cultural Center NY,
<https://www.koreanculture.org/korea-information-government>.

R. P. Barston, *Modern Diplomacy*, London: Routledge, 2013.

Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Gyorgi Szondi, "Public Diplomacy and Nation Branding",
Clingendael Discussion Papers in Diplomacy, no. 112,
<https://www.diplomacy.edu/public-diplomacy-and-nation-branding-conceptual-similarities-and-differences>.

Nicholas J. Cull, *Public Diplomacy: Lesson from The Past*, Los Angeles: Figueroa Press, 2009.

Mark Leonard, *Public Diplomacy*, London: The Foreign Policy Centre, 2002.

Millton C. Cummings, *Cultural Diplomacy And The United States Government: A Survey*, (Washington DC: Center for Arts and Culture, 2003)

Koenjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Clyde Kluckhohn yang dimuat dalam Koenjaraningrat,
Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan.

John W. McDonald, "The Institute for Multi-Track Diplomacy" 3,
no. 2 (2013): 66–70.

Vandenbergh Layne, "South Korea's 2 New Year Celebrations,"
THE DIPLOMAT, <https://thediplomat.com/2019/01/south-koreas-2-new-year-celebrations/>.

"2016 Sejong Hakdang Korean Speech Contest," Korean Cultural
Center, <http://id.korean-culture.org/ko/486/board/232/read/76811>.

"Kunjungan Menteri Budaya, Olahraga, dan Pariwisata Republik
Korea; Do Jonghwan," *Saung Korea*, n.d.,
<http://saungkorea.com/kunjungan-menteri-budaya-olahraga-dan-pariwisata-republik-korea-do-jonghwan>.

Korean ID, "'Traditional Korean Songs & Dance' Berhasil Kenalkan
Budaya Korea Lewat Musik Dan Tarian Tradisional!," n.d.,
<https://korean-id.com/2018/10/30/coverage-traditional-korean-songs-dance-berhasil-kenalkan-budaya-korea-lewat-musik-dan-tarian-tradisional/>.

"Pertunjukan Watch Good Performance," *My Korean Drama*, n.d.,
<http://www.mykoreandrama.com/2018/10/pertunjukan-watch-good-performance.html>.

"Global Taste Of Korea 'Hansik Contest' Unj – Jakarta," *Saung
Korea*, <http://saungkorea.com/global-taste-korea-hansik-contest-unj-jakarta-18-19-mei-2017/>.

Esthi Maharani, "Festival Makanan Korea Di Kampus Jakarta,"
Republika, n.d., <https://www.republika.co.id/berita/gaya->

hidup/kuliner/17/05/16/oq1dpv335-festival-makanan-korea-di-kampus-jakarta.

Milton C. Cummings, *Cultural Diplomacy And The United States Government: A Survey*, Washington DC: Center for Arts and Culture, 2003.

"I.K.Y.K.," Jakarta Fashion Week, n.d.,
<https://www.jakartafashionweek.co.id/designer-profile/304/i-k-y-k>.

Orvina Myrilla, "JFW 2017: Korean Cultural Center Presents I.K.Y.K Dan Twee x Hwansung Park," *Gadis*,
<https://www.gadis.co.id/info-gaya/jfw-2017-korean-cultural-center-presents-i-kyk-dan-twee-x-hwansung-park>.

Pradita Ananda, "JFW 2017 : Girl Crush Ala Korean Street Style Hadirkan Kesegaran Khas Remaja," *Okelifestyle*,
<https://lifestyle.okezone.com/read/2016/10/29/194/1527663/jfw-2017-girl-crush-ala-korean-street-style-hadirkan-kesegaran-khas-remaja>.

Milton C. Cummings, *Cultural Diplomacy And The United States Government: A Survey*.

"About," D-antidote.com, http://d-antidote.com/?page_id=9&ckattempt=1.

Andika Aditia, "Korea Indonesia Film Festival 2018 Resmi Dibuka," *Kompas*,
<https://entertainment.kompas.com/read/2018/10/18/221732910/korea-indonesia-film-festival-2018-resmi-dibuka>.

Nana Rohanawati, "Kemeriahan Opening Ceremony Korea Indonesia Film Festival (KIFF) 2016," *Book My Show Indonesia*,

n.d., <https://id.bookmyshow.com/blog-hiburan/kemeriahan-opening-ceremony-korea-indonesia-film-festival-kiff-2016/>.

Dani Prabowo, "Hingga 2020, Graha Layar Buka 100 CGV Di Seluruh Tanah Air," *Kompas*,
<https://properti.kompas.com/read/2019/01/16/140000021/hingga-2020-graha-layar-buka-100-cgv-di-seluruh-tanah-air>.

Kezia Calesta, "Twitter Indonesia Berbagi Momen Populer 2016,"
<https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/12/2016/11152/twitter-indonesia-berbagi-momen-populer-2016>.

"10 Hashtag Terpopuler di Indonesia Sepanjang 2017", *Kumparan*,
<https://kumparan.com/@kumparantech/10-hashtag-terpopuler-di-twitter-indonesia-sepanjang-2017>.

Tisa Ajeng, "BTS Wings Tour Jakarta", *Tribun Style*,
<https://style.tribunnews.com/2017/04/30/bts-wings-tour-jakarta-fasih-berbahasa-indonesia-bangtan-buat-penggemar-indonesia-histeris>.
<http://id.korean-culture.org/id/486/board/232/read/88296>.

Diplomasi pada Era Informasi

Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri, dan Membangun Citra

Buku "Diplomasi Pada Era Informasi, Digitalisasi, Kebijakan Luar Negeri dan Citra Negara" membahas berbagai aspek diplomasi pada era informasi. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), telah mengubah tatanan sosial, ekonomi dan politik global, serta aktivitas manusia modern, termasuk diplomasi. Internet memungkinkan aktivitas "diplomasi tanpa diplomat", yang didukung Kedutaan Besar Virtual, serta diplomasi digital (*digiplomacy* atau *e-diplomacy*). Internet dan teknologi informasi menjadi sarana komunikasi untuk mengejar tujuan, menjalankan fungsi diplomasi, dan memperjuangkan kepentingan nasional. Internet menggantikan pertemuan tatap muka menjadi dalam jaringan (*daring*). Melalui internet, berbagai aktivitas negosiasi, penyusunan kebijakan, manajemen krisis, dan perlindungan warga negara, dimungkinkan dilakukan secara virtual.

Keberadaan media sosial beserta masyarakat jaringan semakin signifikan dalam mendukung program diplomasi publik. Peran aktor-aktor non-pemerintah juga meningkat dalam memengaruhi dan membangun kebijakan luar negeri. Konsekuensinya, era internet menuntut keterampilan khusus dari para diplomat modern, untuk menjangkau dan berkomunikasi dengan publik di negara tujuan. Pergeseran budaya komunikasi ini sangat dipengaruhi keterampilan digital para pelaku diplomasi, termasuk para Kepala Negara dan Pemerintahan.

Untuk membahas diplomasi secara lebih mendetail, buku terbagi atas tiga bagian: diplomasi virtual, diplomasi ekonomi, dan diplomasi publik. Selain keterampilan digital, keterampilan dalam diplomasi ekonomi juga menjadi perhatian khusus dan fokus negara untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara diplomasi publik terkait erat dengan membangun citra Negara / *Nation Branding* yang juga melibatkan media sosial dan ekonomi kreatif. Kecenderungan baru dalam menerapkan *soft power* dan berbagai platform media (film, musik, drama, fesyen, dan lainnya) dimanfaatkan secara optimal untuk memengaruhi hati dan pikiran masyarakat di negara tujuan.



Prof. Dr. Sukawarsini Djelantik, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, FISIP-Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung. Mengajar pada program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Magister Ilmu Hubungan Internasional (MHI), dan Magister Ilmu Sosial (MIS). Mengampu mata kuliah Diplomasi, Komunikasi Internasional, Hubungan Internasional Asia Timur, Konflik Sosial dan Pembangunan, Terorisme Internasional. Penelitian dan publikasi terkait topik diplomasi, konflik dan keamanan global, komunikasi internasional.



Jl. Ciumbuleuit No 100,
Bandung 40141
unparpress@unpar.ac.id

PERPUSTAKAAN UNPAR



000000145238



9 786237 879343